

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Dian Eka Rahayu Sawitri, 2013, *Kebijakan Clean and Clear Dalam Menata Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara*. Tesis, Fakultas Hukum Indonesia.
- Ferry Aries Sunanta, 2012, *Penggunaan Tanah Hak Ulayat dalam Investasi Sumber daya Alam di Indonesia*, Jakarta, Gramata.
- Harsono Boedi, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR Nomor IX/MPR2001*, Jakarta, Universitas Trisakti Press.
- Redi Ahmad, 2014, *Hukum Pertambangan*, Bekasi, Gramata.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Sunggono Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Supramono Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Bekasi, Rajawali Pers.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara..

C. WEBSITE

<https://harianhaluan.com/news/detail/6337/ancaman-konflik-emas-pasaman.html>

<https://walhisumbar.or.id/detailartikel.php?art=50&art2=spers>